



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

LAPORAN

Pusat Pelayanan Informasi & Dokumentasi
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2016



Laporan Pelayanan Informasi KPU Sumatera Barat

1. Gambaran Umum

Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat melahirkan perkembangan pesat pada media massa cetak, elektronik dan *online*. Kondisi ini menimbulkan pertukaran informasi lebih cepat dan menghendaki adanya komunikasi dan transparansi yang lebih besar dalam pengelolaan pelayanan publik.

Komunikasi dianggap sebagai kewajiban dasar bagi pelayanan publik sehingga menjadikan komunikasi sebagai suatu sumber fundamental dan tidak tergantikan untuk menjamin adanya efektifitas, efisiensi dan transparansi administrasi publik (Valentini, 2013), petugas komunikasi memainkan peranan penting karena besarnya kontribusi mereka terhadap munculnya pengertian publik terhadap administrasi publik, timbulnya rasa peduli pada peran pengambil kebijakan publik, ketersediaan layanan sosial dan resiko kesehatan dan keselamatan publik.

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan salah satu indikator dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) karena negara Indonesia sendiri telah menjamin hak setiap warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sesuai ketentuan Pasal 28 F UUD 1945. Untuk menjamin hak warga negara, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam rangka melaksanakan Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana serta melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2015, melaksanakan pelayanan informasi publik dan membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Kemudian, dilanjutkan dengan pengesahan Surat Keputusan KPU Sumatera Barat Nomor 37/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi di Lingkungan KPU Sumatera Barat dan Surat Keputusan KPU Sumatera Barat Nomor 105/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU Sumatera Barat.

Adapun dasar hukum kegiatan ini adalah sebagai berikut;

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu;
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU;
- h. Keputusan KPU RI nomor 1 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis/Petunjuk Pelaksanaan Program dan Kegiatan DIPA KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2016;
- i. DIPA KPU Provinsi Sumatera Barat Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2016.

Langkah awal dalam misi besar pelayanan informasi publik oleh KPU ini tidak berhenti di sini saja, sebab sebagaimana yang telah tertuang dalam Surat nomor 113/KPU/III/2016, tentang Tindak lanjut Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik tahun 2016, PPID KPU RI berencana mengintegrasikan PPID KPU Kabupaten/Kota, Provinsi, dan PPID KPU RI dalam satu laman aplikasi PPID elektronik yang nantinya dapat diakses oleh siapa saja yang membutuhkan informasi, tanpa harus datang ke Kantor KPU yang menjadi tujuan permintaan informasi. Diharapkan langkah pemenuhan keterbukaan informasi publik ini dapat membantu mempermudah masyarakat, serta dibutuhkan kritik saran membangun dalam membantu mewujudkan kinerja keterbukaan informasi PPID KPU Sumatera Barat menjadi lebih baik. Sebagai bentuk upaya KPU RI memacu kualitas pelayanan informasi publik di tingkat KPU Provinsi, maka KPU RI mengadakan pemeringkatan tingkat kepatuhan KPU Provinsi se Indonesia. KPU Provinsi Sumatera Barat mendapatkan peringkat 3 dari 33 satuan kerja yang dievaluasi.



Gambar 1. Penerimaan Penghargaan Peringkat III Kepatuhan Pelayanan Informasi Publik di tingkat provinsi di KPU RI.

Laporan PPID ini merupakan tindak lanjut surat KPU RI nomor 464/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016 perihal Pengawasan Pengelolaan Aplikasi PPID *online* di lingkungan KPU.

Lebih lanjut, KPU Provinsi Sumatera Barat meraih peringkat satu kategori instansi vertikal pada penghargaan anugerah Keterbukaan Informasi Publik tahun 2016 (KI *Award*) 2016 yang diadakan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat tanggal 8 September 2016 lalu di Padang.



Gambar 2. Penerimaan Penghargaan Peringkat I Keterbukaan Informasi Publik Kategori Instansi Vertikal di Sumatera Barat.

2. Sarana dan Prasana

Pelayanan informasi sebelum PPID terbentuk, dilakukan oleh Sub bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat. Setelah terbentuknya struktur PPID, maka pelayanan langsung dilakukan oleh Pejabat PPID melalui desk pelayanan PPID yang bertempat di ruang PPID KPU Provinsi Sumatera Barat.

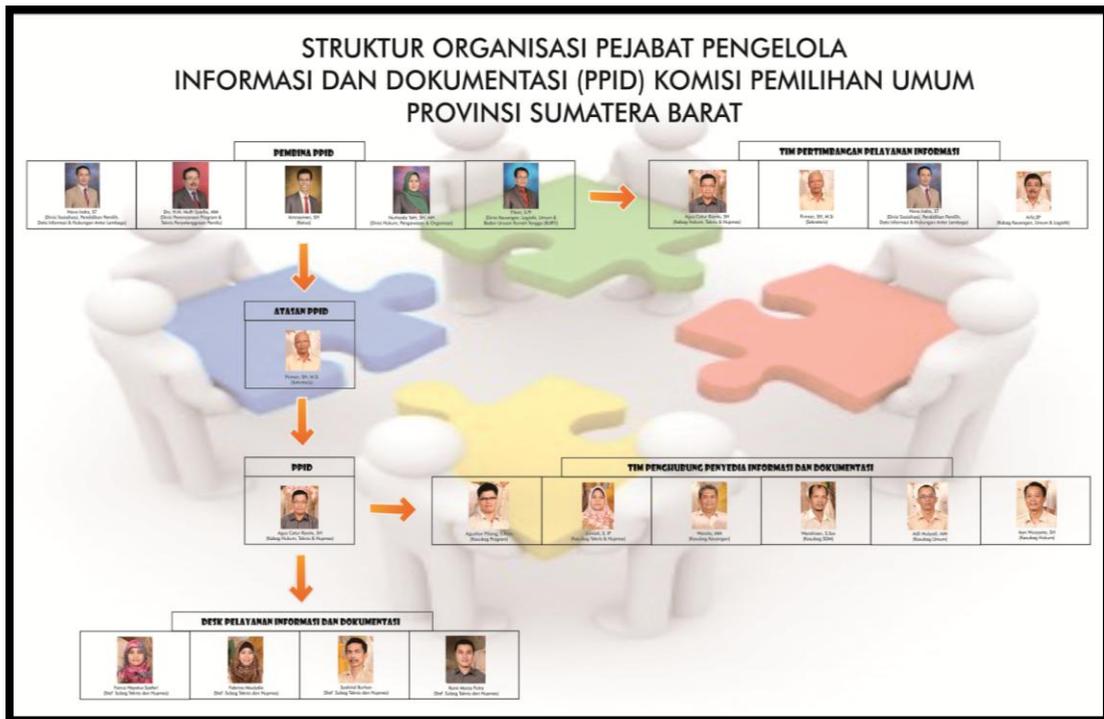
KPU Provinsi Sumatera Barat telah memiliki ruang pelayanan informasi PPID. Ruangan tersebut dilengkapi dengan meja pelayanan, komputer, printer, lemari informasi, meja dan kursi tamu. Satu set komputer tersebut berisi data *soft file*, siap salin. Adapun jika data yang diminta pemohon belum tersedia di PC Desktop, data yang diminta akan disalinkan melalui *data base*

yang ada di masing-masing sub bagian untuk kemudian di salin *soft file* atau *hard copy* dengan rentang waktu standar pelayanan maksimal 10 hari. Namun, KPU Sumatera Barat selalu berusaha agar lebih cepat dari SOP yang ditetapkan tersebut.

3. Anggaran dan Sumber Daya Manusia

Anggaran yang disediakan pada RKA/KL tahun 2016 untuk pelaksanaan kegiatan pembentukan dan penguatan PPID yakni sejumlah 18.974.000, 00 (delapan belas juta rupiah sembilan ratus tujuh puluh empat juta rupiah). Anggaran ini digunakan untuk membentuk ruangan pelayanan informasi dan perjalanan dinas memenuhi undangan KPU RI ke Jakarta.

Dalam melaksanakan pelayanan informasi, KPU Provinsi Sumatera Barat melibatkan semua komisioner dan sekretariat bidang terkait. Pembina PPID adalah semua komisioner, Tim Pertimbangan PPID yakni Divisi Sosialisasi, Sekretaris dan ketiga Kepala Bagian di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Barat. Atasan PPID yakni Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat Firman, SH, M.Si. Pejabat PPID merupakan Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas yakni Agus Catur Rianto, SH. Tim Penghubung PPID merupakan kepala sub bagian di lingkungan KPU Sumatera Barat dan Desk Pelayanan adalah staf Teknis dan Hupmas KPU Provinsi Sumatera Barat.



Gambar 3. Struktur Organisasi PPID KPU Provinsi Sumatera Barat

4. Rincian Pelayanan Informasi dan Grafik

Pada tahun 2016, Pemohon informasi yang mengajukan permintaan informasi secara langsung ke KPU Provinsi Sumatera Barat sebanyak 48 pemohon. Pemohon informasi tersebut umumnya berlatar belakang pengurus partai politik dengan tujuan melengkapi data mereka, instansi pemerintah dengan tujuan melengkapi data mereka, mahasiswa dengan tujuan untuk tugas kuliah dan penelitian skripsi.

| No. | Uraian | Jumlah | Waktu |
|-----|-------------------------------------|--------|-----------------------|
| 1. | Informasi yang diberikan seluruhnya | 48 | Kurang dari 7 hari |
| 2. | Informasi yang diberikan sebagian | Nihil | Nihil |
| 3. | Informasi yang ditolak | Nihil | Nihil |

5. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Di tahun 2016 ini, PPID KPU Provinsi Sumatera Barat tidak menerima satupun pengajuan keberatan pelayanan informasi publik dari pemohon informasi, demikian juga pada tahun sebelumnya 2015.

6. Kendala dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Kendala-Kendala Layanan Informasi Publik di KPU Provinsi Sumatera Barat yaitu:

- A. Tata kelola arsip belum diterapkan dengan semestinya;
- B. Arsip belum terdigitalisasi secara menyeluruh, sehingga terkadang memperlambat proses penyediaan data;
- C. Sumber daya manusia terbatas, sehingga terkadang pelayanan informasi harus dilakukan oleh personel yang merangkap dalam bidang lain;
- D. Belum tersedia manual operasional Laman *e-ppid*, sehingga memperlambat proses integrasi informasi antara PPID Kabupaten/Kota, PPID KPU Provinsi Sumatera Barat dengan PPID KPU RI.

7. Rencana Tindak Lanjut

- 1. Update informasi pada PPID online.
- 2. Menyusun Daftar Informasi Publik Tahun 2017.
- 3. Meningkatkan jumlah arsip digital.

FORMULIR PEMBERIAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2016

| NO | NO. PENDAFTARAN | TANGGAL | NAMA PEMOHON | TUJUAN PENGAMBILAN INFORMASI | CARA MEMPEROLEH INFORMASI | CARA MENDAPATKAN SALINAN INFORMASI |
|----|------------------------|------------|------------------------------|---|--|------------------------------------|
| 1 | 01/PPID/Form/I/2016 | 13-01-2016 | Febriani | Data Proposal Tesis | Mendapatkan salinan informasi | Mengambil Langsung |
| 2 | 02/PPID/Form/I/2016 | 21-01-2016 | Ernalis | Pembekalan Partai Politik | Mendapatkan salinan informasi | Mengambil Langsung |
| 3 | 03/PPID/Form/I/2016 | 26-01-2016 | Wanda Pratama | Data Skripsi | Mendapatkan salinan informasi | Mengambil Langsung |
| 4 | 04/PPID/Form/II/2016 | 04-02-2016 | Drs. Ridwan, M.Si | Pembekalan Partai Politik | Mendapatkan salinan informasi | Mengambil Langsung |
| 5 | 05/PPID/Form/II/2016 | 22-02-2016 | Kevin Prabevi | Data Skripsi | Melihat/Membaca/Mendengar/Mencatat | Mengambil Langsung |
| 6 | 06/PPID/Form/III/2016 | 01-03-2016 | Rini Ludia Fathira | Data Skripsi | Mendapatkan salinan informasi hardcopy | Mengambil Langsung |
| 7 | 07/PPID/Form/IV/2016 | 08-03-2016 | Wirdanis | Keperluan Partai Politik | Mendapat salinan informasi | Mengambil Langsung |
| 8 | 08/PPID/Form/IV/2016 | 23-03-2016 | Ahmad Rido | Data Skripsi | Mendapat salinan informasi | Mengambil Langsung |
| 9 | 09/PPID/Form/IV/2016 | 04/11/2016 | Enrico Donal Sidauruk | Data Skripsi S1 Kepolisian | Mendapat salinan informasi | Mengambil Langsung |
| 10 | 10/PPID/Form/IV/2016 | 14-04-2016 | Dr. Ir. I Wayan Jondra, M.Si | RKA Pilgub Bali 2015 | Mendapat salinan informasi | Mengambil Langsung |
| 11 | 11/PPID/Form/IV/2016 | 18-04-2016 | Manufer Putra Firdaus | Tugas Kuliah | Mendapatkan salinan informasi | Mengambil Langsung |
| 12 | 12/PPID/Form/IV/2016 | 19-04-2016 | Welly Junaidi | Keperluan Komisi Informasi | Mendapatkan salinan informasi hardcopy | Mengambil Langsung |
| 13 | 13/PPID/Form/IV/2016 | 25-04-2016 | Hj. Aksanul Husna | Pembekalan Partai Politik | Mendapat salinan informasi | Mengambil Langsung |
| 14 | 14/PPID/Form/IV/2016 | 25-04-2016 | Yondra Jumayasa | Data Skripsi | Melihat/Membaca/Mendengar/Mencatat | Mengambil Langsung |
| 15 | 15/PPID/Form/IV/2016 | 25-04-2016 | Muhammad Iqbal | Data Skripsi | Mendapat salinan informasi | Mengambil Langsung |
| 16 | 16/PPID/Form/IV/2016 | 20-06-2016 | Hj. Aksanul Husna | Pembekalan Partai Politik | Mendapat salinan informasi | Mengambil Langsung |
| 17 | 17/PPID/Form/VI/2016 | 18-07-2016 | Drs. Sukarna | Laporan DPD Golkar | Mendapat salinan informasi | Mengambil Langsung |
| 18 | 18/PPID/Form/VII/2016 | 21-07-2016 | Drs. Sukarna | Bahan Rapimnas Partai Golkar | Mendapat salinan informasi | Mengambil Langsung |
| 19 | 19/PPID/Form/VIII/2016 | 15-08-2016 | Aguswanto | Bahan Rapimnas Partai Golkar | Mendapat salinan informasi | Mengambil Langsung |
| 20 | 20/PPID/Form/VIII/2016 | 16-08-2016 | Drs. Sukarna | Bahan Rapimnas Partai Golkar | Mendapat salinan informasi | Mengambil Langsung |
| 21 | 21/PPID/Form/VIII/2016 | 19-08-2016 | M. Salahuddin | Persiapan Pencalonan DPD Pemilu 2019 | Mendapat salinan informasi | Mengambil Langsung |
| 22 | 22/PPID/Form/VIII/2016 | 29-08-2016 | Isa Kurniawan | Keperluan PAN Sumatera Barat | Mendapat salinan informasi | Mengambil Langsung |
| 23 | 23/PPID/Form/IX/2016 | 05-09-2016 | Rahmadia Putra | Setda Pemprov Sumbar | Mendapat salinan informasi | Mengambil Langsung |
| 24 | 24/PPID/Form/IX/2016 | 19-09-2016 | Syaiful Amri | | Mendapat salinan informasi | Mengambil Langsung |
| 25 | 25/PPID/Form/IX/2016 | 19-09-2016 | DR. Darlis Ilyas, MH | Persiapan pencalonan walikota payakumbuh | Mendapat salinan informasi | Mengambil Langsung |
| 26 | 26/PPID/Form/IX/2016 | 20-09-2016 | Isa Kurniawan | | Mendapat salinan informasi | Mengambil Langsung |
| 27 | 27/PPID/Form/IX/2016 | 20-09-2016 | Kolonel Syahril Bakri | Data Kemenhan RI | Mendapat salinan informasi | Mengambil Langsung |
| 28 | 28/PPID/Form/IX/2016 | 28-09-2016 | Gusranil Fitri | Proposal Penelitian | Mendapat salinan informasi | Mengambil Langsung |
| 29 | 29/PPID/Form/IX/2016 | 03-10-2016 | Muhammad Fadhlan | Laporan Magang | Mendapat salinan informasi | Mengambil Langsung |
| 30 | 30/PPID/Form/IX/2016 | 04-10-2016 | Muhammad Fauzi | Data Skripsi | Mendapat salinan informasi | Mengambil Langsung |
| 31 | 31/PPID/Form/IX/2016 | 04-10-2016 | Ryandi Anggia Putra | Tugas Kuliah | Mendapat salinan informasi | Mengambil Langsung |
| 32 | 32/PPID/Form/IX/2016 | 10/10/2016 | Herry Santoso, S.Psi | Pelaksanaan tes urine Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota oleh BNN Sumbar | Mendapat salinan informasi | Mengambil Langsung |
| 33 | 33/PPID/Form/XI/2016 | 09-11-2016 | Jonnedy Kambang | Tugas Kuliah | Mendapat salinan informasi | Mengambil Langsung |
| 34 | 34/PPID/Form/XI/2016 | 15-11-2016 | Tonino Kasmar | Data Kantor | Mendapat salinan informasi | Mengambil Langsung |
| 35 | 35/PPID/Form/XI/2016 | 04-11-2016 | Jetas Rahman | Tugas Kuliah | Mendapat salinan informasi | Mengambil Langsung |
| 36 | | | | | | |
| 37 | | | | | | |
| 38 | | | | | | |
| 39 | | | | | | |
| 40 | | | | | | |